

SKRIPSI

POLITIK ENERGI INDONESIA (ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK PADA BULAN SEPTEMBER 2022)

INDONESIAN ENERGY POLITICS (ANALYSIS OF FUEL SUBSIDY ADJUSTMENT POLICY IN SEPTEMBER 2022)

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

MUHAMMAD AQSAL ANDHANA

E041191067

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLITIK ENERGI INDONESIA
(ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR
MINYAK PADA BULAN SEPTEMBER 2022)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AQSAL ANDHANA

E041191067

Telah dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pada Tanggal 10 Bulan Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Phil. Sukri, S. IP, M. Si.
NIP. 19750818 200801 1 008


Haryanto, S. IP., M. A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
POLITIK ENERGI INDONESIA
(ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR
MINYAK PADA BULAN SEPTEMBER 2022)

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AQSAL ANDHANA

E041191067

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Phil. Sukri, S. IP, M. Si. (.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A. (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D (.....)

Anggota : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqsal Andhana
NIM : E041191067
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Politik Energi Indonesia (Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Pada Bulan September 2022)**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2023



Muhammad Aqsal Andhana

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunia setelah melalui penantian panjang dan melewati berbagai perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh serta pergantian judul dan topik berkali-kali, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“Politik Energi Indonesia (Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM Pada Bulan September 2022)”**. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Skripsi ini saya tulis sebagai salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP)

Pertama dan paling utama skripsi ini saya persembahkan kepada Almarhumah Mama tercinta dan tersayang yang sangat berperan besar dan tak pernah lelah mengingatkan “selesain kuliahnya cepet-cepet cang mama pengen liat anak mama sarjana” terimakasih **Mama Betty (Hj. Hubiyati Binti H. Nonci)**, semoga mama bahagia di surga melihat saya telah berhasil menempuh gelar sarjana, saya hanya ingin bilang misi 1 selesai, selamat menikmati perjuangan misi-misi berikutnya dari atas sana semoga kelak bisa

bertemu kembali dengan mama dalam kehidupan yang kekal. Tak lupa kepada Bapak **H. Sapri Buttu**, semoga turut berbahagia dengan keluarga barunya.

Terimakasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing saya Bapak **Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.** dan Bapak **Haryanto. S. IP., M. A.** yang telah membimbing saya dengan sabar dan ikhlas dari awal menulis skripsi hingga akhir masa penulisan.

Skripsi ini saya selesaikan tidak terlepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.**, beserta jajaran yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin. Tak lupa kepada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022 **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M. A.** Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.** sekaligus pembimbing utama dan dosen saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin serta memberikan beribu ilmu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi saya.

3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S. Sos., M. Si.** Beserta jajaran staf akademik yang telah memperlancar berbagai urusan administratif selama saya menjadi mahasiswa Fisip Unhas.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M. Si.** beserta jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M. Si.** beserta jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.** yang telah membantu kelancaran administrasi akademik sekaligus dosen penguji saya, tak lupa terimakasih atas pemberian beasiswa kepada saya di saat saya memiliki masalah perekonomian pada semester yang lalu.
7. Dosen favorit saya Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S. IP., M. Si.,** yang telah memberikan banyak masukan sekaligus menjadi dosen penguji pada perjalanan penulisan skripsi saya.
8. Bapak Ibu Dosen lainnya di Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., (Alm.)** Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.,** Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.,** Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.,** Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.,** Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.,** Ibu

Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada saya apa arti politik sebenarnya selama masa perkuliahan.

9. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S. T.,** dan Ibu **Musriati, S. E.** yang telah membantu memperlancar saya dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan selama menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Politik.
10. Seluruh teman – teman Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah kebersamai saya selama menjadi mahasiswa ilmu politik, meskipun sempat dipisahkan oleh jarak karena pandemi. Semoga kalian terhindar dari status pengangguran. Spesial untuk komandanku tercinta Pak Gubernur **Cuccang bin Karaeng Nawang, Zaky Irgi Bin Puang Safri, Rista Ilma, Rahmat Hidayat** (Bupati Selayar 2039), **Plum bin Rindang, Aisyah binti Daeng Ahmad, Riglo, Risda, Ica.**
11. Seluruh teman – teman Diplomasi 2019, yang telah memberikan warna di Himpunan Mahasiswa Polisi alias Politik sejak awal bertemu di pohon copping hingga akhir kelulusan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga pinggang kita semakin kuat menahan gejolak kehidupan dan pertanyaan kapan nikah.

12. Seluruh teman-teman KKNT Stunting Unhas Gelombang 108 Kota Parepare yang juga memberikan pengalaman berharga selama masa KKN.
13. Seluruh tim AT LAST Social Space yang telah memberikan kesempatan bagi saya belajar berbisnis, gapapa, coba lagi nanti see you on top guys.
14. Spesial juga kepada keluarga penulis di Jakarta kakak saya **Muhammad Aggra Andhara, S. M** dan adik saya **Muhammad Afwa Dzikirillah**, semoga kita bisa menjadi milyarder. Terimakasih juga untuk **mama ume', kaka susan, dan chesa** yang selalu masak makanan kesukaan penulis selama dirumah. Tak lupa keluarga yang berada di bulukumba (**Alm. Etta Buttu, Mama Cia, Om Dambang, Tante Uka, Om Baso, Daeng H. Kr. Tenri Bas Pratama, dek Inul, Om Cahu dan Istri, Tante Eti, Om Herman, dek Abil, Bilal, dan al**). Keluarga yang berada di Parepare (**Om H. Asike, Tante Hj, Ena, Kaka Ades dan Ayu, Kaka Yudhi dan Whiwi, dek Yuyun, Almh. Wiranda Asike, Obi si kocak, dan bayi lucu Oqi**) atas beberapa transferan dan pengisian saldo rekening saya yang terkadang suka mengalami resesi global.
15. Kepada Rohis Padi Green Resort, **Galur Jamets, Eca Suicide, Iqbal Korea, Rafky Mabuy, Vladimir Ivan, Sekjen Tepe** terimakasih sudah menemani penulis pada masa-masa maba.

16. Kepada abang **Ichlasul Amal, S. H. Int.**, atas kesediaannya dalam membantu penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bantuan yang tulus dan begitu berharga karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan kajian studi literatur.
17. Kepada **Kaka Ila**, terima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah pada masa penulisan skripsi ini dan terima kasih juga telah memberikan pengalaman hidup serta warna baru dalam hidup saya, *Roger That* 101.
18. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berdoa, perhatian, kepo, stalking, secret admire, dan menyayangi saya secara implisit maupun eksplisit. Terimakasih untuk semuanya karena telah menyisihkan sebagian dari kehidupan berharga kalian untuk saya yang setelah ini akan mencari pundi-pundi harta karun untuk mengatasi kantong kering.
19. Kepada **Asusy** alias Laptopku si paling bandel, yang sudah berkali-kali minta jajan terimakasih sudah menemaniku sejak 2011 hingga sekarang, teringat kita hampir aja buat kebakaran salah satu cafe yang tidak perlu disebutkan namanya karena casan yang tiba tiba meledak, good job! mari berjuang kembali.
20. Kepada **Beaty** alias motor peninggalan mamah, yang terkadang suka manja alias minta dibawa ke bengkel, tapi manja-manja kuat juga sih soalnya kalo dipake antar daerah larinya kaya black panther.

21. Kepada dua puluh peluru alias **Magnum Max**, terimakasih karena telah melancarkan pikiranku ketika sedang stress dan mentok saat menulis penelitian ini, selesai juga pren.
22. Kepada **saya sendiri**, yang suka merendah untuk meroket. Keren juga ya kalo dipikir-pikir saya, **walau sarjanaku terlambat, tapi saldo atm ku otw gaada obat. Bismillah, sukses dunia akhirat.**

Saya selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, maka kepada para pembaca yang budiman saya selalu terbuka akan kritik, koreksi, serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 10 Februari 2023



Muhammad Aqsal Andhana

ABSTRAK

Muhammad Aqsal Andhana – E041191067. Politik Energi Indonesia (Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM Pada Bulan September 2022). Di bawah bimbingan Sukri sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.

Kebijakan subsidi BBM dalam perjalanan pemerintahan dan pergantian Presiden menjadi hal penting terhadap kestabilan perekonomian dan pembangunan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangannya harga minyak dunia yang semakin meningkat dibarengi juga dengan semakin berkurangnya kapasitas cadangan minyak dunia kemudian menyadarkan Indonesia bahwa perihal ini bertolak belakang dengan semakin bertambahnya konsumsi BBM di seluruh dunia. Pemberian subsidi semakin lama dirasa cukup membebani APBN dan menimbulkan masalah baru yakni persoalan Kesehatan ruang fiskal. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pemerintah serta tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah pada penyesuaian subsidi BBM serta implikasinya.

Dengan mengacu pada konsep politik energi pemerintah Indonesia wajib melakukan kerja sama terhadap semua stakeholder serta elemen masyarakat yang merasakan efek dahsyat membengkaknya subsidi BBM. Tulisan ini mencoba menguraikan analisis kebijakan penyesuaian subsidi BBM dalam perspektif ekonomi politik neoliberalisme sebagai bentuk upaya pemerintah menghadapi ancaman krisis energi dan dalam ranah kebijakan tulisan ini menguraikan tidak kuatnya APBN menanggung hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka menjalankan Undang Undang No 12 Tahun 2011 kebijakan penyesuaian subsidi BBM yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 beserta kebijakan turunannya seperti Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM/2022 berhasil sebagai politik energi Indonesia dalam kebijakan serta sebagai wujud ketahanan energi dalam konteks kondisi terjaminnya ketersediaan pasokan energi yang menjadikan APBN sebagai *Shock Absorber* ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas masyarakat bahwa meskipun harga BBM naik 30% per bulan September 2022, namun kondisi makro ekonomi Indonesia masih di atas 5% atau lebih tepatnya 5,72% pada kuartal III/2022 dan juga mampu menurunkan defisit Indonesia sebesar 2,19%. Di sisi lain pemerintah harus lebih memperhatikan tata kelola BBM di Indonesia dan harus cepat menyesuaikan kondisi dalam menghadapi krisis energi.

Kata Kunci : Politik Energi, Kebijakan, Subsidi BBM, Neoliberalisme.

ABSTRACT

Muhammad Aqsal Andhana – E041191067. Indonesian Energy Politics (Analysis Of Fuel Subsidy Adjustment Policy In September 2022). Under the guidance of Sukri as the Main Advisor and Haryanto as the Assistant Advisor.

The fuel subsidy policy in the course of government and the change of President is important for economic stability and development. As time goes by and the development of world oil prices is increasing accompanied by the decreasing capacity of world oil reserves, Indonesia is aware that this is the opposite of the increasing consumption of fuel throughout the world. The provision of subsidies is increasingly felt to be quite a burden on the state budget and raises new problems, namely the issue of fiscal space health. For this reason, this study aims to determine the attitude of the government and the level of success of government policies on fuel subsidy adjustments and their implications.

Concerning the concept of energy politics, the Indonesian government is obliged to cooperate with all stakeholders and elements of society who feel the devastating effects of the fuel subsidy hike. This paper tries to describe the analysis of the policy of adjusting fuel subsidies from the perspective of neoliberalism political economy as a form of the government's efforts to face the threat of an energy crisis and in the realm of policy this paper describes the inability of the State Budget to cover this by using a descriptive qualitative research method.

The results of the study show that in order to implement Law No. 12 of 2011 the fuel subsidy adjustment policy as outlined in Presidential Regulation No. 98 of 2022 and its derivative policies such as Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 218.K/MG.01/MEM/2022 has succeeded as Indonesia's energy policy in policy as well as a form of energy security in the context of guaranteed conditions for the availability of energy supply which makes the State Budget a Shock Absorber marked by an increase in community activity that even though the price of fuel has increased by 30% per September 2022, but Indonesia's macroeconomic conditions are still above 5% or more precisely 5.72% in the third quarter of 2022 and are also able to reduce Indonesia's deficit by 2.19%. On the other hand, the government must pay more attention to fuel management in Indonesia and must quickly adjust to conditions in the face of the energy crisis.

Keywords : Energy Politic, Fuel Subsidy, Policy, Neoliberalism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	XII
ABSTRACT	XIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR TABEL	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Akademis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Konsep Politik Energi	21
2.2.1 Pengertian Politik Energi.....	22
2.2.2 Politik Energi Indonesia.....	23
2.2.3 Politik Energi Dalam Kebijakan Publik	25
2.2.4 Politik Energi Dalam Ketahanan Energi	28
2.3 Perspektif Ekonomi Politik	30
2.3.1 Neoliberalisme.....	32
2.4 Kerangka Berpikir	36
2.5 Skema Penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian	39
3.3 Jenis Data Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	43
3.6 Desain Penelitian.....	44
3.7 Metode Penulisan.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	47
4.1 Deskripsi Umum Kebijakan BBM Indonesia	47
4.1.1 Masa Orde Lama (Pemerintahan Presiden Soekarno)	47
4.1.2 Masa Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto)	49
4.1.3 Masa Reformasi dan Pasca Reformasi (Pemerintahan Presiden B. J Habibie – Joko Widodo)	53
A. Pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie	53
B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid	53
C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri	55
D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	57
E. Pemerintahan Presiden Joko Widodo	58
4.2 Perkembangan Energi BBM Indonesia	61
4.2.1 Asumsi Kebijakan Terkait Energi Nasional	63
4.2.2 Realisasi Subsidi BBM 2016-2021	65
4.3 Dasar Kebijakan Subsidi BBM Pemerintah Jokowi	67
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	73
5.1 Pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM September 2022.....	73
5.1.1 Deregulasi Kebijakan sebagai Instrumen Kepentingan Ekonomi Nasional	75
5.1.2 Legitimasi Pengambilan Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM September 2022.....	91

5.1.3 Implementasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM September 2022	93
5.1.4 Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM September 2022 ..	104
5.2 Implikasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM September 2022.....	112
5.2.1 Implikasi Ekonomi	113
5.2.2 Implikasi Sosial.....	119
5.2.3 Implikasi Politik.....	121
BAB VI PENUTUP.....	124
6.1 Kesimpulan.....	124
6.2 Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Penelitian.....	45
Gambar 2. Perkembangan Subsidi energi Tahun 2016-2021.....	66
Gambar 3. Tren Harga Minyak Dunia Januari 2020 - Oktober 2022	76
Gambar 4. Tren Harga Minyak Mentah Indonesia (<i>Indonesian Crude Price</i>) Januari 2020 – Juli 2022	76
Gambar 5. Perkiraan Nilai Subsidi dan Kompensasi 2022.....	78
Gambar 6. Data Susenas Tahun 2020 Pengguna Solar (Subsidi Energi belum sepenuhnya Tepat Sasaran).....	79
Gambar 7. Data Susenas Tahun 2020 Pengguna Pertalite (Pertalite masih banyak dinikmati oleh Masyarakat Mampu).....	81
Gambar 8. Laporan Kementerian Keuangan	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. <i>Summary Data Collection Scheme</i>	42
Tabel 4. 1 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden Soekarno .	49
Tabel 4. 2 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden Soeharto..	52
Tabel 4. 3 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden Gus Dur ...	54
Tabel 4. 4 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden Megawati .	56
Tabel 4. 5 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden SBY	58
Tabel 4. 5 Perkembangan Harga BBM Subsidi Era Presiden Joko Widodo	60
Tabel 5. 1 Sikap Sembilan Fraksi DPR RI Soal Kenaikan Harga BBM. ...	94
Tabel 5. 2 Pertimbangan Pemerintah	108
Tabel 5. 3 Pertimbangan Para Ahli dan Pengamat	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari berbagai kebijakan yang ada di dalam negeri kebijakan kenaikan BBM merupakan kebijakan yang sangat mempengaruhi dinamika politik Indonesia, kemudian tidak hanya dalam aspek politik aspek – aspek lainnya juga ikut terpengaruh seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan subsidi BBM sudah menjadi kebijakan yang akrab ditengah masyarakat Indonesia sejak lebih dari satu dekade. Hal ini membawa pemerintah dihadapkan dengan persoalan kesehatan ruang fiskal yang berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, BBM menjadi pengaruh yang paling besar dalam persoalan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangannya, pengaruh harga minyak dunia semakin meningkat yang disebabkan oleh semakin berkurangnya kapasitas cadangan minyak dunia dan semakin bertambah pula konsumsi akan pemakaian BBM di seluruh dunia.

Kemudian dari sekian banyaknya peristiwa geopolitik di dunia, Konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan hal yang serius dampaknya ke berbagai negara terutama terhadap Indonesia dan seperti yang kita ketahui Rusia dan Ukraina juga merupakan negara eksportir berbagai komoditas di dunia. Sejauh ini ekspor energi Rusia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonominya sejak kuartal terakhir abad kesembilan belas. Kebijakan ekspor

energi merupakan elemen integral dari kebijakan luar negeri Rusia secara keseluruhan. Sektor energi memainkan peran penting dalam politik domestik di Rusia, dan juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara itu. Sejak era industri, Rusia telah menjadi pemain sentral di pasar minyak dunia. Pada pergantian abad kedua puluh, Rusia adalah negara pengeksportir minyak terbesar di dunia eksportir.¹ Pada tahun 1970-an, meskipun ladang Uni Soviet mengalami permasalahan, tetapi Uni Soviet masih melampaui Amerika Serikat sebagai penghasil minyak bumi terbesar di dunia dan terkadang, minyak terbesar di dunia eksportir. Dan hal itu tetap berlanjut hingga pada tahun 1993 Rusia menjadi pengeksportir gas alam terbesar di dunia.²

Di sisi lain invasi yang terjadi pada 24 Februari 2022 di ibukota Kyiv dan beberapa wilayah timur Ukraina. Setelah Rusia melakukan penyerangan, semua mata dunia tertuju terhadap pemimpin Rusia Putin. karena deklarasinya pada tanggal 24 Februari 2022 dikutip dari CNBC Indonesia.³ Presiden Rusia menyatakan melancarkan operasi militer di wilayah Donbass, Ukraina, dan memerintahkan pasukan tentara Rusia untuk mengebom ibu kota Ukraina, Kyiv. Jelang satu hari pasca serangan pertama Rusia, Amerika Serikat, Inggris,

¹ Brenda Shaffer, *Energy Politics*, (Philadelphia : Pennsylvania Press, 2009), hlm. 175.

² Ibid. hlm 175.

³ Tommy Satrio Sorongan, "*Putin Deklarasi Perang Perintahkan Serbu Ukraina, Kyiv Dibom*" diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224101446-4-317894/putin-deklarasi-perang-perintahkan-serbu-ukraina-kyiv-dibom> pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 15.45 WITA.

NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*), dan Kanada⁴ memberikan sanksi dan hukuman keras untuk Rusia atas penyerangan yang terjadi di Kyiv. yang isinya merupakan pelarangan Rusia untuk memukul sektor keuangan di mana bank Rusia dibekukan oleh para pemimpin negara tersebut, dari sektor energi Rusia tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi baik impor maupun ekspor terhadap negara tersebut. Namun, meskipun telah melakukan penyerangan hingga kemarin pasca 100 hari konflik melalui ekspor energi Rusia laporan dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih Finlandia (CREA). Rusia masih mendapatkan sekitar 98 Miliar Dolar Amerika melalui penjualan bahan bakar fosil.⁵ Ini membuktikan peranan Rusia dalam politik energi dunia yang merupakan negara yang memiliki *resources* penuh terhadap konflik. Namun hal ini menyebabkan ancaman krisis energi global pada negara-negara yang memiliki ketergantungan seperti Indonesia dipicu dari melambungnya harga energi dan beberapa komoditas yang menjadi mata pencaharian Rusia, hari Sabtu, 5 Maret 2022 minyak dunia jenis Brent pasca serangan Rusia naik hingga 6,93% dan berada di harga 118,11\$ per barel, sementara minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik hingga 7,44% di

⁴ Tim CNN Indonesia, "Daftar Sanksi Ekonomi yang Diterima Rusia Pasca Serang Ukraina" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220226133455-532-764412/daftar-sanksi-ekonomi-yang-diterima-rusia-pasca-serang-ukraina> pada tanggal 4 September 2022 pukul 16.50 WITA.

⁵ Andrei Ilas, "Financing Putin's war: Fossil fuel imports from Russia in the first 100 days of the invasion" diakses melalui <https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-100-days> pada tanggal 4 September 2022 pukul 18.30 WITA.

harga 115,68\$ per barel.⁶ Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap negara yang mengandalkan impor dan Indonesia salah satunya.

Sejak tahun 2008 Indonesia yang telah resmi keluar dari OPEC dan menjadi net importir akibat tingginya konsumsi yang tidak dibarengi dengan produksi yang ada hal ini yang membawa memicu ketergantungan energi yang nyata terhadap negara – negara yang menjadi langganan impor Indonesia dalam komoditas Minyak Bumi dan Hasil – Hasilnya seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Nigeria, Uni Emirat Arab, Australia, Korea Selatan, Tiongkok dan Qatar yang juga terkena dampak dari konflik Rusia dan Ukraina karena tidak stabilnya permintaan dan kapasitas produksi para negara yang menjadi net eksportir minyak bumi. Di sisi lain meskipun jarak geografis Indonesia dengan Rusia dan Ukraina sangat jauh, Indonesia sebenarnya tidak langsung terkena dampak dari perang Rusia dan Ukraina namun dikarenakan Indonesia yang sejak lama menerapkan subsidi tampaknya Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat dirasakan dibuktikan dengan pemerintah harus mengambil langkah menaikkan harga BBM non subsidi maupun BBM Subsidi yang mengikuti

⁶ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "*Harga Minyak Dunia Meroket akibat Invasi Rusia, Mungkinkah Ada Kelangkaan Jilid 2?*" diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/193000165/harga-minyak-dunia-meroket-akibat-invasi-Rusia-mungkinkah-ada-kelangkaan?page=all> pada 6 September 2022 pukul 03.00 WITA

harga minyak mentah dan harga BBM dunia yang mengikuti mekanisme dan fluktuasi pasar.

Selain itu Indonesia sendiri merupakan negara yang telah lama menerapkan kebijakan subsidi sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang mana kebijakan ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pemerataan dalam akses ekonomi dan pembangunan, tujuan utama adanya subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial yang telah diamanatkan dalam konstitusi secara khusus pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang artinya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara ini harus benar – benar dikelola dengan sebaik – baiknya agar dapat dinikmati oleh segenap masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir orang.

Kebijakan subsidi BBM memang sudah sangat akrab ditengah masyarakat sejak era orde lama. Perlunya BBM sebagai sumber energi primer dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari telah memaksa pemerintah Indonesia dari setiap masa pemerintahan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pengolahan sumber energi khususnya BBM. Kebijakan-kebijakan ini juga sangat sensitif dan mengundang pro dan kontra dari masyarakat, hal ini

disebabkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pengolahan sumber energi tersebut.

Dalam perjalanan pemerintahan dan pergantian kepemimpinan presiden persoalan kesehatan ruang fiskal menjadi hal penting terhadap kestabilan perekonomian dan pembangunan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangannya harga minyak dunia yang semakin meningkat dibarengi juga dengan semakin berkurangnya kapasitas cadangan minyak dunia kemudian lebih parahnya lagi hal ini bertolak belakang dengan semakin bertambahnya konsumsi BBM di seluruh dunia. Dengan kata lain pemberian subsidi semakin lama dirasa cukup membebani APBN, namun kebijakan yang diambil untuk penyesuaian subsidi juga menimbulkan masalah baru. Adanya kenaikan harga BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, dan gerak kehidupan masyarakat. Dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi. Tentunya aktivitas transportasi, distribusi, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlepas dari keperluan akan BBM. Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial (*exponential effect*) terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dapat dipahami jika diketahui bahwa, kenaikan harga BBM berimplikasi pada makro ekonomi Indonesia. Hasil telaah empiris yang dilakukan para pakar, diantaranya seperti Samuelson (2004), Said Sa'ad Marthon (2004) yang menelaah tentang *great depression* dalam perekonomian dunia, sesungguhnya tidak terlepas dari kajian mereka

terhadap adanya dampak dari guncangan harga minyak yang terjadi di negara-negara di dunia, yang berimplikasi terhadap perekonomian dunia. Hal ini sungguh persoalan yang sulit untuk Indonesia khususnya sebagai negara penghasil minyak bumi, selayaknya menjadi negara pengekspor neto tetapi justru juga sebagai pengimpor. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat, adalah diantaranya disebabkan belum dilakukannya pendayagunaan dan pengelolaan sumberdaya minyak ini secara optimal, baik dari sisi teknologi produksi, manajemen, sumberdaya manusianya, dan juga faktor-faktor lainnya yang signifikan.⁷

Hingga Pada tanggal 3 September 2022 pemerintah secara resmi mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218 Tahun 2022 tentang harga eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Dengan ketetapan diatas Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM dengan Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar Subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertamina dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

⁷ Muhandi. *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia*. MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Universitas Islam Bandung. (Volume 21, No.4, Tahun 2005). hlm 7

Alasan pemerintah ini juga diperkuat dengan adanya data yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menunjukkan proporsi Subsidi BBM pada tanggal 27 Juni 2022, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres No. 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pertimbangan lain dari Pemerintah menyesuaikan harga BBM yakni subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menkeu menyebut, untuk Peralite 86% penggunaanya yakni rumah tangga di mana 80% merupakan kelompok mampu, dan untuk Solar lebih ekstrim 95% digunakan oleh kelompok mampu.⁸

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan setiap tahun adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (Perusahaan Anak BUMN yang memegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi di mana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan BBM tersebut. Kemudian definisi “subsidi BBM” yang

⁸ Kementerian Keuangan, “*Penyesuaian Harga BBM, Menkeu : Kita Mencoba Menahan dengan Menaikkan Anggaran Subsidi dan Kompensasi Hingga Tiga Kali Lipat*” diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penyesuaian-Harga-BBM,-Menkeu-Kita-Mencoba-Menahan> pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.11 WITA

dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka – angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk menyesuaikan subsidi BBM termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM.

Hal ini yang tentunya menarik perhatian penulis dimulai dengan telaah penelitian terdahulu (*previous study*) seperti dampak pencabutan subsidi BBM pada masa pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2017, dampak pencabutan subsidi BBM terhadap keuangan negara, kemudian peran doktrin pertahanan negara dalam menghadapi ancaman krisis energi, lalu persoalan liberalisasi energi Indonesia .

Isu energi merupakan salah satu isu yang penting dan perlu menjadi perhatian kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri dan diplomasi Indonesia. Energi merupakan sebuah komoditas strategis yang menjadi isu penting dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang dapat mendukung efektifitas dan optimalisasi diplomasi indonesia di tingkat regional dan internasional.⁹ Ditambah Isu energi semakin kuat karena pemborosan dan tingkat pemakaian yang sangat tinggi untuk keperluan pembangkit listrik, pertanian, perindustrian, transportasi, kedokteran, dan untuk keperluan rumah tangga serta pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), karena itu anjuran

⁹ Athiqah nur Alami dan Nanto Sriyanto, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi: Missing Link dalam sektor energi Indonesia*, Jakarta: LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2014.

untuk melakukan pemakaian secara hemat, dan sangat dinanti atau dicari alternatif sumber energi terbarukan. Sejalan dengan itu Indonesia pun mencoba mencari berbagai alternatif energi terbarukan (EBT) yang mencoba peralihan dari energi fosil.

Namun sejalan dengan itu, gejala inflasi yang semakin meroket dan dilema ekonomi yang semakin rumit ditambah pemicu yang disebabkan oleh konflik geopolitik yakni invasi atas Rusia ke Ukraina. Melonjaknya harga gas alam cair dan minyak bumi yang diimpor oleh Qatar dan Arab Saudi membuat negara-negara di Eropa berpikir dua kali untuk melakukan aktivitas ekspor-impor sumber daya alam tersebut. Dilema yang terjadi adalah pilihan untuk merelakan pengeluaran negara yang luar biasa banyak atau negara yang kekurangan gas dan minyak bumi termasuk Indonesia karena harga minyak melambung hingga menembus 100 US\$/barelnya.

Dikarenakan Eropa dan Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak dan gas cair dari Qatar dan Arab Saudi, Eropa dan Amerika meminta aliansi OPEC terutama bagi negara produsen terbesar untuk menggunakan sebagian dari kapasitas cadangan minyak dan gas mereka. Hal ini dianggap penekanan yang serius bagi Arab Saudi dan Qatar. Direktur Program Ekonomi dan Energi di *Middle East Institute* di Washington, Karen Young mengatakan bahwa, "Kondisi Arab Saudi dan Qatar jika melihat dari keadaan ekonomi dan investasi, mereka kurang bersedia untuk menjadi pahlawan ekspor minyak dan

gas ke Eropa maupun global. Hal ini dikarenakan akan sangat mengikis cadangan minyak dan gas yang dimiliki kedua negara produsen tersebut”.¹⁰

Dari konflik Rusia dan Ukraina Indonesia mungkin mengalami dampak yang tidak langsung karena impor terbesar minyak dan gas berasal dari Arab Saudi. Namun dari sisi *demand* dengan kenaikan harga minyak dan gas internasional ini langsung berdampak kepada kenaikan harga BBM di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) volume impor minyak mentah Indonesia terbesar dari Arab Saudi mencapai 4,42 juta ton dengan nilai US\$ 2,27 miliar. Sumber minyak mentah Indonesia juga berasal dari Nigeria (US\$ 1,94 miliar), Australia (US\$ 809,3 juta), Angola (US\$ 432 juta).¹¹

Sampai saat ini, subsidi BBM tidak dapat dielakkan dan menjadi dilema bagi pemerintah di saat APBN mengalami kondisi yang hampir tidak tertolong atau dengan kata lain defisit. Pemerintah khawatir apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka akan menyebabkan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya atau dengan kata lain disini ialah inflasi. Kemudian apabila harga BBM dinaikkan yang pasti daya beli masyarakat akan mengalami penurunan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Pemerintah juga disini akan khawatir akan

¹⁰ Ali Ashhabul Kahfi, “Dampak Konflik Ukraina dan Rusia di Timur Tengah” diakses melalui <https://kumparan.com/ali-kahfi/dampak-konflik-ukraina-dan-rusia-di-timur-tengah-1xjrNBoARr0rys> pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 23.52 WITA.

¹¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “Reviu Informasi Strategis Energi dan Mineral Harian, 29 Maret 2022” diakses melalui <https://dataharian.esdm.go.id/index.php/2022/03/29/reviu-informasi-strategis-energi-dan-mineral-29-maret-2022/> pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 03.20 WITA.

terjadi demonstrasi di masyarakat apabila harga BBM dinaikkan. Posisi ini terus menjadi dilema bagi pemerintah. Namun di sisi lain, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, maka kenaikan jumlah konsumsi BBM setiap tahun, akan didampangi dengan bertambahnya beban subsidi BBM dalam APBN dan pada akhirnya menambah defisit APBN. Sulit rasanya untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi pada masyarakat, kalau tidak ada kenaikan harga itulah mengapa dilema ini mengharuskan pemerintah harus cepat mengambil langkah dengan mengeluarkan keputusan yang diumumkan pada bulan september 2022.

Kemudian merujuk pada permasalahan energi yang terjadi serta dampaknya yang juga sangat dirasakan Indonesia maka perlu adanya suatu penelitian untuk menjawab permasalahan ini. Penulis membawa dan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia yang harus mempercepat pemerintah mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM dengan masalah utama yaitu karena subsidi yang membengkak dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan ditambah lagi dengan faktor pemicu yaitu serangan Rusia atas Ukraina yang menyebabkan dinamika harga minyak dunia melambung tinggi.

Analisis lebih lanjut penelitian ini berfokus terhadap kebijakan yang berkaitan dengan energi Bahan Bakar Minyak atau BBM. Dan yang kedua ialah Implikasi dari kebijakan yang muncul terhadap kondisi di dalam negeri terutama dalam aspek dinamika politik yaitu berkaitan dengan implikasi

kebijakan tersebut terhadap kondisi di dalam negeri dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik . Berangkat dari hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Politik Energi Indonesia (Analisis Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM Pada Bulan September 2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana politik energi Indonesia dalam kebijakan penyesuaian subsidi BBM ? .
2. Bagaimana implikasi yang timbul setelah dikeluarkannya kebijakan penyesuaian subsidi BBM ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan penelitian yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sikap pemerintah serta tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah pada penyesuaian subsidi BBM dalam kerangka politik energi, perspektif ekonomi politik neoliberalisme.

2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan setelah kebijakan penyesuaian subsidi BBM dikeluarkan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini memberikan manfaat sebagai acuan pembelajaran dan tentunya memperkaya kajian ilmu politik dalam perkembangan keilmuan khususnya kajian ekonomi politik, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan penelitian baru dalam melihat kebijakan terkait energi khususnya perihal subsidi energi dan implikasi yang terjadi dalam kerangka politik energi dan perspektif ekonomi politik neoliberalisme sehingga dapat menambah kegunaan ilmu politik sebagai pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi dan diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya serta peran pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis energi dengan mempercepat mengeluarkan kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak yang pada akhirnya harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan penjelasan mengenai konsep dan pendekatan yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan politik energi pemerintah Indonesia yang harus mengeluarkan kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Selanjutnya konsep dan pendekatan dirangkum menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan permasalahan penelitian yang membantu menumbuhkan serta memperkaya referensi penelitian sekaligus menjadi pembanding dalam penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam memperkaya referensi tentunya pencarian penelitian terdahulu merupakan bagian dari usaha peneliti untuk mencari sumber data dan menjadikan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu memberikan manfaat untuk menunjukkan urgensi dari sebuah penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya :

1. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh **Dani Syahroni Putra Napitupulu** dari Universitas Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rezim Jokowi JK”** pada Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kebijakan

publik ditambah dengan konsep subsidi BBM, adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pencabutan subsidi bahan bakar minyak di masa pemerintahan Jokowi – JK mengalami perdebatan yang cukup alot antara pemerintah dan kelompok – kelompok masyarakat, di mana kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kebawah, di sisi lain para ahli juga berpendapat bahwa pengelolaan migas perlu adanya peningkatan dengan cara memperbaiki regulasi pengelolaan sektor hulu maupun hilir migas, pencabutan subsidi memang mengurangi beban anggaran belanja negara sesuai janji kampanye Jokowi – JK, namun pemerintah harus lebih terbuka mengenai risiko fiskal yang dialami negara sehingga dapat diterima oleh masyarakat kenapa akhirnya BBM dinaikkan dan tentunya BBM harus dipandang sebagai komoditas yang tidak bertahan lama sehingga sudah selayaknya pemerintah untuk mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan.

2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad **Dicky Alghaffar**, **Susilo Adi Purwantoro**, dan **Yanif Fwi Kuntjoro** dari **Universitas Pertahanan Republik Indonesia** dalam **Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 2022** dengan judul “**Peran Doktrin Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Krisis Energi dan Perubahan Iklim di Indonesia**” pada Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual doktrin pertahanan negara dan dari konsep tersebut adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa doktrin pertahanan negara

dirumuskan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu sampai lahirnya gerakan yang membawa Indonesia hingga saat ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan merupakan potensi bagi ancaman negara. Untuk itu diperlukan doktrin yang kuat guna melindungi dan mengelola sumber daya alam yang berlimpah dengan baik dan benar. Pada sektor energi terdapat adanya ancaman krisis energi dan perlu adanya tindakan yang sistematis untuk pemenuhan kebutuhan energi di wilayah 3T. Untuk itu perlu dukungan lebih dari pemerintah maupun rakyat untuk mengembangkan energi yang baru dan tentunya akan berdampak terhadap perekonomian negara, ketika perekonomian negara baik maka pertahanan negara akan semakin kokoh.

3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh **Julian Muhammad Hasan** dari Universitas Pamulang dalam *Journal Academia* dengan judul “**Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif GOOD GOVERNANCE**” pada April Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan perspektif *good governance* dan dari perspektif tersebut adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah dalam rangka mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Atas kenaikan harga tersebut, pemerintah akan menyiapkan skema penyaluran dana kompensasi dengan

menggunakan uang elektronik. Bantuan tersebut diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran dana kompensasi tersebut adalah wujud upaya penerapan visi Presiden Joko Widodo. Namun, bantuan KIS, KIP dan KKS masih dipertanyakan darimana asal anggaran tersebut. Implementasinya pun tidak berkonsultasi dengan DPR dan tidak memberikan penjelasan kepada publik darimana asal dana kartu-kartu tersebut. Hal itu mengabaikan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, namun mekanisme yang ditempuh kurang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) menjawab kritikan atas biaya penerbitan KIS, KIP dan KKS. Penerbitan semua kartu tersebut anggarannya berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN yang sifatnya hanya sementara, namun untuk tahun berikutnya, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN. Bahkan, Pratikno menganjurkan bahwa yang terpenting sekarang ini adalah fokus pada kelancaran penyelenggaraan program KIS, KIP, dan KKS. Selanjutnya, Jusuf Kalla (Wakil Presiden) pun menegaskan bahwa program KIS, KIP, dan KKS memiliki payung hukum. Begitu pun dengan anggarannya, ada di APBN dan payung hukumnya ada di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh **Ahmad Rizky Marfhatillah Umar** dari Universitas Gadjah Mada dalam JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul **“Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca 1998”** pada Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Neo-Marxisme ditambah dengan perspektif Ekonomi Politik Internasional, adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam membaca kenaikan harga BBM, persoalan liberalisasi di sektor hulu dan hilir serta oligarki dalam struktur perdagangan minyak internasional tak boleh luput dari bacaan. Kenaikan harga BBM di beberapa negara dunia ketiga, atas dalih “penyelesaian struktural atas kondisi global:.. Sesungguhnya memasukan Indonesia pada nalar *“Neoliberal Constitutionalization”* -meminjam Gill (2000)- yang hanya meletakkan negara sebagai penjaga garis pinggir permainan yang sepenuhnya diletakkan pada kedaulatan pasar. Agenda reformasi neoliberal dalam bidang Migas telah meletakkan format liberalisasi dalam setting kebijakan Indonesia, dimulai dari penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2000, pengesahan UU Migas baru pada tahun 2001, lepasnya Pertamina sebagai industri tunggal di sektor hulu maupun hilir pada tahun 2005, hingga kebijakan kenaikan harga BBM yang segera akan terjadi. Semuanya tidak didasarkan atas kepentingan nasional, melainkan kepentingan oligarki di pasar dunia yang kini tengah melambungkan

harga minyak dunia. Dengan pembacaan ini, diskursus mengenai kenaikan harga BBM tidak hanya perlu diletakkan dalam kerangka perdebatan “subsidi itu tepat atau tidak”, melainkan juga pada kerangka “berdaulat atau tidaknya pengelolaan energi di sektor hulu dan hilir”. Persoalan kenaikan harga BBM tidak terlepas dari proses peneguhan fondasi kekuasaan struktural internasional (*international structural power*— Susan Strange). Dan artinya, jika dimasukkan dalam kerangka ekonomi politik internasional, kenaikan harga BBM adalah bagian dari relasi kekuasaan internasional yang menancap di level domestik. Jika variabel ini dapat dimasukkan pada perdebatan mengenai kenaikan harga BBM, perdebatan yang dilahirkan pada kenaikan harga BBM tidak semata diletakkan dalam kaca mata ekonomisme, tetapi juga ekonomi politik. Dari sini, mungkin kita akan mendapatkan ‘benang merah’ yang lebih konklusif mengenai pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi politik energi nasional.

Dari empat penelitian diatas memiliki hubungan serta keterkaitan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu melihat bagaimana melihat kebijakan subsidi BBM bagi keuangan negara dalam perspektif *Good Governance* lalu bagaimana kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi BBM ketika beban fiskal negara tidak mampu diwadahi oleh APBN sehingga harus dilakukan pencabutan terhadap subsidi anggaran energi pada pemerintahan

Jokowi-JK serta bagaimana liberalisasi energi yang terjadi di Indonesia pasca 1998, dan yang menjadi pembeda serta tambahan khazanah. Sebagai kebaruan penelitian penulis mencoba menganalisis bagaimana upaya serta efisiensi politik pemerintah Jokowi mencoba untuk menghindari pencabutan subsidi dan kompensasi BBM dan mengapa justru mengambil langkah efisiensi penyesuaian subsidi dan kompensasi dan akhirnya menaikkan harga BBM dalam menjaga stabilitas ekonomi negara pada APBN 2022 dalam kerangka politik energi dan ekonomi politik neoliberalisme.

2.2 Konsep Politik Energi

Konsep politik energi merupakan pembahasan kedua dari kerangka penelitian secara spesifik. Energi merupakan faktor yang mempengaruhi hasil kebijakan baik luar maupun dalam negeri suatu negara dan alat potensial dari kebijakan luar negeri. Meningkatkan keamanan pasokan energi merupakan bagian dari agenda keamanan nasional negara-negara pengimpor energi, sedangkan tujuan memastikan pasar yang stabil merupakan agenda kebijakan negara-negara pengeksport. Akses yang stabil ke minyak, termasuk selama masa perang.¹²

¹² Brenda Shaffer, Foreign Policy. In Energy Politics University of Pennsylvania Press, 2009. (pp. 28–46) diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/j.ctt3fhf4v.5> pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 00.34 WITA.

2.2.1 Pengertian Politik Energi

Politik Energi berasal dari dua kata yaitu “politik” yang secara luas menurut Prof. Miriam Budiardjo didefinisikan sebagai negara, kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, serta alokasi¹³ dan “energi” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan. Dapat disimpulkan politik energi dalam arti luas merupakan ilmu yang mempelajari persoalan kebijakan yang terkait dengan komoditas strategis sebuah daya atau kekuatan untuk menuju kepada kepentingan yang mampu dirasakan manfaatnya. Politik energi juga diterjemahkan secara sempit dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Dalam sudut pandang politik, energi dijadikan sebagai alat dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan dalam negeri suatu negara dan menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan seperti penetapan anggaran pembelanjaan negara, dan kebijakan energi seperti penetapan harga eceran tertinggi pada minyak kelapa sawit atau penetapan harga bahan bakar minyak sebuah negara. Keberadaan energi saat ini telah menjadi sebuah hal yang krusial bagi suatu negara. Selain menciptakan kompetisi

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2017, hlm. 16-22

energi juga dibutuhkan untuk mendapatkan jaminan atas kelangsungan akses dan alokasi energi adalah hal utama yang harus dipenuhi.¹⁴ Ketergantungan Energi menjadi alasan dasar betapa menariknya sumber daya energi dari setiap bangsa karena dari situ pola-pola yang terbentuk akan berujung kepada bisnis yang menguntungkan.

2.2.2 Politik Energi Indonesia

Ilmu politik sebagai sebuah kajian mengalami perkembangan yang pesat pasca perang dunia ke II, pendekatan serta ruang lingkup yang digunakan menjadi semakin luas dan kompleks. Keberadaan energi memang sangat terkait dengan kekuasaan secara politik dan ekonomi. Menurut pandangan Steven Cohen, ada dua faktor utama untuk memahami kecanduan akan energi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik dalam bisnis energi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan kecanduan akan energi Indonesia yang juga dikemukakan oleh Steven Cohen di mana kecanduan ini juga menyebabkan kepada ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara penghasil minyak olahan yang pada akhirnya sangat mempengaruhi posisi Indonesia dalam politik internasional serta arah kebijakan Indonesia dalam lingkungan domestik.

¹⁴ Angga Nurdin Rachmat, Vol. 3 No.1 (Januari – Juni 2018), *Jurnal Indonesian Perspective : Indonesia dalam Pusaran Politik Energi Global, Universitas Jenderal Achmad Yani*.

¹⁵ Steven Cohen, "The Politics of Petroleum Prices and Our Energy Future" diakses melalui http://www.huffingtonpost.com/steven-cohen/the-politics-of-petroleum_b_1320685.html, pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 04.45 WITA.

Konsep politik energi Indonesia membawa ke arah pemenuhan kebutuhan akan keamanan pasokan energi dalam negeri yang kenyataannya masih memiliki ketergantungan dari kedua negara tersebut dan tidak hanya Rusia dan Ukraina, bahkan negara seperti Singapura dan Malaysia pun Indonesia masih bergantung. Kemudian ditambah komoditas yang diimpor Indonesia dari Rusia dan Ukraina merupakan komoditas yang produknya merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Seperti minyak bumi, gas bumi, listrik, dan bahan bakar nabati.¹⁶ Dalam hal komoditas energi, minyak bumi merupakan komoditas yang menjadi magnet politik utama yang kemudian menyebabkan banyak terjadi dinamika di dalam politik energi Indonesia. Ditambah lagi dengan masalah utama yaitu bengkaknya subsidi BBM yang tidak dapat lagi ditanggung APBN.

Dikutip dari Stiglitz,¹⁷ sumber daya alam seperti menjadi “kutukan” bagi negara – negara berkembang. Pertama, karena alam perkembangannya negara – negara berkembang secara ekonomi bergantung pada sumber daya alam, bahkan lebih dari sepertiga pendapatan ekspor Afrika contohnya berasal dari sumber daya alam. Negara – negara Afrika, Timur Tengah, sebagian Rusia (Turkmenistan, Kazakhstan, dll), sebagian Amerika Latin (seperti

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, “*Ini Daftar Barang Impor Indonesia dari Rusia pada 2021*”, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/01/ini-daftar-barang-impor-indonesia-dari-rusia-pada-2021> pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 02.01 WITA

¹⁷ Joseph Stiglitz. *Washington Consensus (Deregulasi, Liberalisasi, Privatisasi): Menuju Arah Jurang Kehancuran 2002* Pent.: Darmawan Triwibowo. Jakarta: INFID. _(2006). Making Globalization Work. London: Norton & Company. Hlm 134

Mexico, Bolivia, Venezuela, Peru, dan Ekuador), dan Indonesia semuanya bergantung pada sumber daya alam dan energi. Kemudian yang kedua, karena negara – negara yang kaya akan sumberdaya energi cenderung mempunyai rakyat yang miskin. Hal ini merupakan sebuah paradoks yang memberikan wawasan tentang kegagalan globalisasi secara lebih luas dan kemungkinan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara – negara tersebut dimanfaatkan oleh penguasa ekonomi dunia.¹⁸

Dari beberapa penjelasan konsep politik energi lahir sebuah perhatian khusus pemerintah Indonesia yang tentunya menjadi aspek yang mampu melihat sebuah permasalahan dalam segi upaya pemerintah Indonesia di mana upaya tersebut tentunya lebih lanjut berada pada langkah strategis pemerintah Indonesia melalui kebijakan revisi APBN 2022 tentang subsidi dan kompensasi BBM sekaligus penetapan kenaikan harga minyak domestik.

2.2.3 Politik Energi Dalam Kebijakan Publik

Politik energi biasanya diterjemahkan dalam kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai aspek untuk mendukung sektor energi. Setiap kebijakan publik memiliki batasan yang fungsinya sebagai keperluan membentuk kerangka/model penelitian. Dalam penelitian ini penulis

¹⁸ Ahmad Rizky, Jurnal ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: *Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca 1998*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.

melihat salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye, yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).¹⁹ Thomas R. Dye juga menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu²⁰ :

1. Identifikasi masalah kebijakan

Upaya mendefinisikan problem serta merupakan langkah awal penelitian.

2. Penyusunan agenda

Ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.

3. Perumusan kebijakan

Tahapan ini berisi masalah yang sudah masuk yang kemudian dibahas oleh para pembuat dan analis kebijakan.

4. Pengesahan kebijakan

Proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsi-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.

¹⁹ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implemetasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015, hlm 4.

²⁰ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005, hlm 154.

5. Implementasi kebijakan

Tahapan ini merupakan usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang kemudian dijalankan.

6. Evaluasi kebijakan.

Kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan dan merupakan langkah terakhir dari sebuah proses kebijakan publik.

Kemudian Pressman dan Wildavsky, mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengundang kondisi-kondisi awal serta akibat yang dapat diramalkan. Kedua tokoh ini melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan dan mereka beranggapan bahwa kebijakan mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan/antisipasi sebelumnya.²¹ Begitu pula Dr. Taufiqurokhman dalam bukunya menjelaskan bahwa definisi kebijakan publik yang umum saat ini, dan bertebaran di dunia nyata biasanya definisinya memiliki 5 unsur dan unsur tersebut diantaranya adalah; yang pertama ialah tujuan, kedua ialah rencana, ketiga ialah program, keempat keputusan, dan kelima ialah efek atau dampak.²²

Berangkat dari perspektif kebijakan publik dari para ahli diatas penulis kemudian memberikan batasan konsep dalam penelitian yaitu dengan melihat

²¹ Ibid. hlm 8

²² Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014, hlm 149-150.

implikasi dari kebijakan subsidi BBM yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan turunannya.

2.2.4 Politik Energi Dalam Ketahanan Energi

Menurut Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional bahwa kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sementara ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.²³

Indonesia sedang dihadapi dengan berkurangnya cadangan minyak dan gas bumi setiap tahunnya yang semakin meningkat dari permintaan masyarakat maupun perindustrian. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti naik turunnya harga minyak bumi di pasar internasional yang mengakibatkan menghambatnya perkembangan perekonomian negara, selanjutnya hasil produksi minyak yang dikelola oleh negara tidak seimbang dengan permintaan yang ada di dalam negeri, maka Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik dan harus mengimpor sebagai sebuah solusi yang dirasa efektif. Dengan ketersediaan sumber energi di Indonesia saat ini

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.

seperti minyak, tidak akan mencukupi pasokan energi di masa mendatang dikarenakan permintaan energi minyak setiap tahun semakin meningkat dan biaya subsidi pada energi minyak semakin besar.

Politik energi memberikan ruang terhadap ketahanan energi Indonesia yang melihat dari 4 Aspek (*Availability*, *Accessibility*, *Affordability*, dan *Acceptability*) yang mana disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan nasional untuk membangun ketahanan energi²⁴ :

1. *Availability* meliputi Ketersediaan sumber energi dan energi, baik dari domestik maupun luar negeri.
2. *Accessibility* meliputi kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografi politik.
3. *Affordability* meliputi biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen.
4. *Acceptability* meliputi penggunaan energi yang peduli lingkungan, baik darat, laut maupun udara, termasuk penerimaan masyarakat.

²⁴ Muhammad as Hikam. 2014. *Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025 Tantangan dan Harapan*. Jakarta: CV. Rumah Buku. Hal. 9.

Penulis mendefinisikan politik energi sebagai ketahanan energi sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Politik energi sebagai ketahanan energi memiliki keterkaitan langsung dengan keamanan pembangunan nasional sekaligus tolak ukur untuk menjalin hubungan antar negara sekaligus sebagai penggerak perekonomian negara.

2.3 Perspektif Ekonomi Politik

Secara etimologi ekonomi politik berasal dari dua suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang artinya rumah, dan *nomos* yang artinya aturan sehingga dapat didefinisikan sebagai manajemen rumah tangga. Adapun politik yang berasal dari kata *polis* yang berarti kota atau negara. Dengan demikian ekonomi politik adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Ekonomi politik merupakan perspektif yang dipakai dalam penelitian penulis dengan melihat ekonomi politik sebagai arah kekuasaan. Menurut Adam Smith dalam buku *The Wealth of Nations* dijelaskan tentang ekonomi politik yang merupakan cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat dan yang kedua yaitu

menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu menjelaskan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik.²⁵

Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Selain itu Ekonomi politik juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Menurut Caporasi ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Oleh karena itu, secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya instrumen-instrumen ekonomi, seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* politik tempat kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Sistem kekuasaan dan pemerintahan sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi.²⁶

Sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ilmu ekonomi politik yang konvensional tersebut. Jika peran negara atau pemerintah sangat

²⁵ Adam Smith. *The Wealth Of Nation*. Dalam buku Philipus dan Nurul Aini. 2004. Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 126.

²⁶ Mufti, Muslim, *Ekonomi Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, hlm 3.

dominan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara tersebut lebih digolongkan ke dalam anatomi negara sosialis atau komunis. Jika peran negara kecil atau tidak dominan, maka sistem ekonomi politik negara bersangkutan dapat digolongkan pada kelompok negara kapitalis-liberal. Dengan analisis secara anatomis tersebut, maka sistem ekonomi politik secara faktual dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni sistem sosialis dan sistem kapitalis liberal.²⁷

2.3.1 Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah sebuah versi terbaru dari liberalisme klasik dan terutama ekonomi politik klasik. Tema pokoknya adalah ide bahwa ekonomi berjalan paling baik ketika lepas dari campur tangan pemerintah, merefleksikan sebuah keyakinan pada ekonomi pasar bebas dan individualisme atomistik. Sementara kapitalisme pasar yang tidak diatur menghasilkan efisiensi, pertumbuhan dan kemakmuran yang meluas, “tangan kaku” dari negara menghalangi inisiatif dan menghambat usaha. Kebijakan-kebijakan pokok neoliberal di antaranya privatisasi, belanja publik rendah, deregulasi, pemotongan pajak dan pengurangan dana kesejahteraan.²⁸

Neoliberalisme merupakan ideologi maupun model kebijakan yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas dan sering kali dikaitkan

²⁷ Didik J. Rachbini. *Ekonomi Politik (Paradigma dan Teori Pilihan Publik)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 14-16.

²⁸ Andrew Heywood. *Politik (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm 249.

dengan ekonomi *laissez-faire* (sebuah pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke – 18 yang menantang segala intervensi pemerintah dalam setiap urusan bisnis – pemikiran ini berfokus pada persaingan bebas). Prinsip utama neoliberalisme berawal dari pandangan realita dalam lingkungan politik dan ekonomi internasional yang berdasarkan pada institusi dan organisasi internasional untuk berperan dalam penyaluran kesejahteraan dan kekuasaan. Neoliberalis memandang institusi sebagai mediator dan alat untuk mencapai kerja sama antar aktor dalam sistem internasional. Sementara itu, neoliberalisme memandang bahwa negara adalah aktor kesatuan, rasional, dan pemaksimalan utilitas karena membutuhkan penyelesaian masalah dengan perspektif *win-win*.

Asumsi dasar Neoliberalisme yang pertama, adalah Hukum pasar, kebebasan bagi modal, barang dan jasa, sehingga pasar bisa mengatur dirinya sendiri agar gagasan “tetesan ke bawah” dapat mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili serikat buruh, dan menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi mobilitas modal, seperti peraturan – peraturannya. Kebebasan tersebut harus diberikan oleh negara atau pemerintah jadi pasarlah yang berkuasa dan penentu. Kedua, Mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan – pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, Deregulasi, agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme

aturannya sendiri. Keempat, Mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab individual.²⁹

Pada dasarnya neoliberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neoliberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga ketika Indonesia terjatuh pada krisis, neoliberalisme memberikan beberapa penjelasan tentang sebab-musababnya.³⁰

Negara memprioritaskan kepentingan nasional, dan menganalisis biaya untuk memanfaatkan peluang pilihan, reaksi, dan hasilnya. Melalui fokus neoliberalis terhadap sistem internasional yang anarkis, neoliberalisme percaya dan optimis terhadap peluang kerja sama di bawah sistem internasional tersebut dengan institusi. Beranjak kepada definisi lain dari deregulasi menurut Wallich, deregulasi muncul karena didorong oleh (1) keinginan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, (2) persaingan, dan (3) dapat menghasilkan produk (*output*) yang lebih banyak serta mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Secara teoritis, suatu negara yang melakukan deregulasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan persaingan di pasar

²⁹ Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia, *What is "Neoliberalism"?*, National Network for Immigrant and Refugees Rights, Januari, 1997.

³⁰ Eko Prasetyo, *Kapitalisme dan Neoliberalisme*, Ekonomi Politik Journal Al-Manaar, Edisi I/2014, hlm 4.

internasional yang pada akhirnya mampu menghasilkan produk (*output*) lebih banyak dan berkualitas. Jika memang kondisi ini terpenuhi dan dapat diwujudkan dalam prakteknya, pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat akan dapat dicapai.³¹

Deregulasi Kebijakan menjadi hal yang perlu dilakukan adalah reform pada peraturan atau kebijakan yang dinilai menghambat kinerja dan perkembangan birokrasi harus sederhanakan hal ini bertujuan untuk percepatan dalam pemberian pelayanan. Penyederhanaan peraturan atau kebijakan dilakukan dengan melakukan pemetaan pada sejumlah peraturan Pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat kinerja organisasi.³² Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat.³³

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian dengan kerangka teori neoliberalisme bahwa ada keharusan Indonesia menyikapi situasi potensi akan ancaman krisis energi yang terjadi di Indonesia dengan mempercepat mengambil tindakan penyesuaian subsidi BBM karena berbagai faktor, faktor

³¹ Nuyasman MN & Hidayat Wiweko, *Deregulasi Di Indonesia Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Perbankan*, JE/FE Untar/Th.VI/01/2001, Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara, 2001. hlm 35.

³² Sri Yusfina Yusuf & Ma'Mun, *Reformasi Birokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi (Teknis Substantif Administratif Bidang Reformasi Birokrasi)*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020, hlm 24.

³³ Ibid. hlm 61.

utama yaitu bengkaknya subsidi BBM dan faktor pemicu dari hal tersebut salah satunya ialah perang Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak februari 2022.

2.4 Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik dari segi komoditas energi, namun hal itu sebenarnya hanya menjadi kalimat yang sudah lama terdengar dan tidak membuktikan ketenangan pada masyarakat. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan efek yang luar biasa bagi Indonesia dan proses pertumbuhan ekonomi juga menjadi terhambat. Dinamika politik global yang terjadi seakan akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum memiliki *resources* yang cukup untuk menjadi negara yang tidak bergantung terhadap negara – negara besar di Dunia.

Dengan mengacu pada konsep politik energi pemerintah Indonesia secara jelas harus fokus terhadap ancaman krisis energi yang melanda dunia. Melalui hal tersebut pemerintah Indonesia wajib melakukan kerja sama terhadap semua *stakeholder* serta elemen masyarakat yang merasakan efek dahsyat membengkaknya subsidi BBM ditambah dengan Ketegangan geopolitik antar negara telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi yang terjadi yang mengharuskan pemerintah untuk cepat mengambil langkah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan yang secara prinsip dianggap mengedepankan skenario terbaik dalam pengambilan

keputusan dalam jangka waktu yang sangat singkat dan tentunya akan berpengaruh terhadap setiap perjalanan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan analisis kebijakan penyesuaian subsidi BBM dalam perspektif ekonomi politik neoliberalisme sebagai bentuk upaya pemerintah menghadapi ancaman krisis energi dan tidak kuatnya APBN menanggung hal tersebut.

2.5 Skema Penelitian

